

PEMERINTAH KOTA SOLOK

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029**



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-2
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-4
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-118
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	II-2
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin	II-8
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan	II-9
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan	II-9
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Tahun 2024	II-10
Tabel 2.5.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Gambaran Aset dan Sarana Prasarana DPMPPA Tahun 2024	II-12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-16
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada DPMPPA Kota Solok Tahun 2021-2024	II-21
Tabel 2.8	Rekapitulasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Solok Tahun 2020 s/d 2024	II-25
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-33
Tabel 2.10	Pemetaan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-36
Tabel 2.11	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	II-41
Tabel 3. 1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	III-3
Tabel 3. 2	Penahapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	III-4
Tabel 3. 3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	III-8
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok	IV-3
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-39
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-106
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	IV-119
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci	IV-121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang sosial dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Solok. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini berisi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Solok dalam agenda prioritas program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun pertama dari RPJP Kota Solok Tahun 2025-2045.

Secara regulasi Renstra PD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mengedepankan nilai strategis berupa konsistensi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi, dan sinergi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewajiban perangkat daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dan dasar penyusunan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja PD mengatur tahapan, substansi minimal, dan mekanisme verifikasi oleh Bappeda.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 menegaskan kesinambungan perencanaan lima tahunan dan sinkronisasi renstra PD dengan RPJMD dan RPJPN. Nilai strategis Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. **Konsistensi dan Kesinambungan** menjamin keselarasan program dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan visi, misi, dan target RPJMD Kota Solok.
2. **Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja** menjadi tolok ukur evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. **Partisipasi dan Inklusivitas** mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan strategi dan program, sehingga rancangan Renstra lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
4. **Inovasi dan Adaptabilitas** mendorong pengembangan solusi digital baru serta adaptasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
5. **Sinergi dan Terpadu** mewujudkan koordinasi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program, agar sumber daya lebih optimal.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok

Renstra OPD 2025-2029 merupakan Renstra Tahap ke-1 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2025-2045. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan OPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2025-2029. Selanjutnya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029.

c. Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Solok

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok 2025-2029, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok harus dipedomani dalam penyusunan Renja OPD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD.

d. Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok 2025-2029, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Oleh karena itu, penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2025-2029 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164);
 7. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Verval Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
35. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025 – 2045;
36. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;
37. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
38. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. **Penjabaran RPJMD ke ranah teknis PD:** menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang operasional, agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025–2029

2. **Panduan koordinasi lintas sektor:** menjadi instrumen harmonisasi dan sinergi program antar-perangkat daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta demi optimalisasi sumber daya dalam mewujudkan target pembangunan.
3. **Basis pengendalian dan evaluasi:** berfungsi sebagai acuan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan, serta menyediakan tolok ukur untuk evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator yang jelas dan terukur

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. **Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja :** mengkaji keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam penyelenggaraan layanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mengidentifikasi isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja.
2. **Mengakomodir visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah :** menjamin keselarasan antara program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sehingga setiap kegiatan mendukung pencapaian target RPJMD.
3. **Memberikan fondasi bagi Renja tahunan :** menjadi pedoman strategis dan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, agar alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan terarah dan terukur.
4. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi :** menyusun kerangka kerja yang memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.
5. **Mendorong inovasi layanan :** menetapkan strategi layanan sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik Kota Solok.

Dengan adanya Renstra, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat bekerja secara lebih terencana, terarah, dan terukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, dan Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah, Sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta Arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikat dan Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

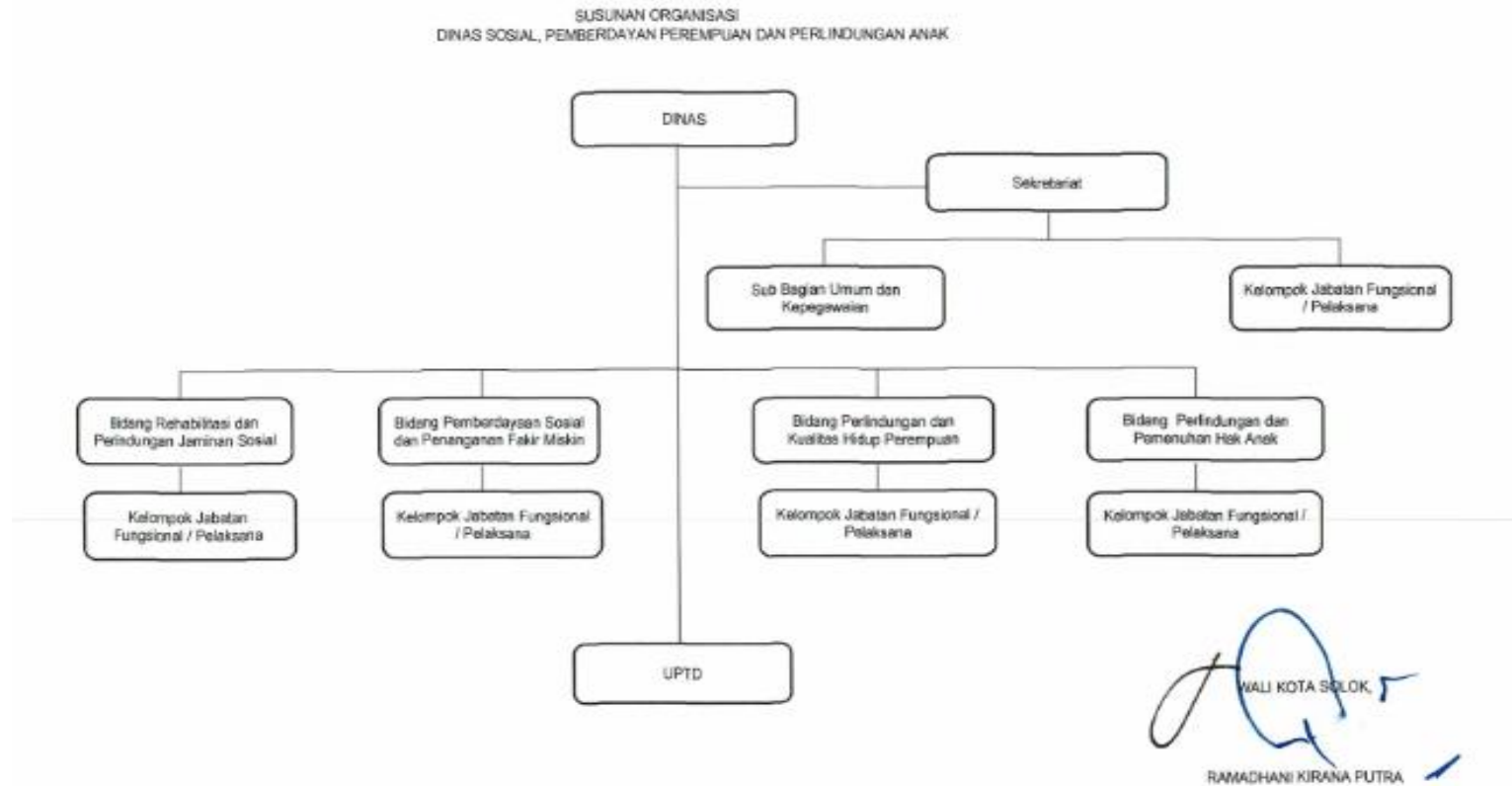
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial dan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat
- b. Bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial:
- c. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
- d. Bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan;
- e. Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok



Sumber : Peraturan Wali Kota Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 18 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/ aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;

- e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/ juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan mengalami *Acquired Immunodeficiency Syndrome* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psicotropika dan zat adiktif lainnya untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
 - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan

pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan;
- b. pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan;
- c. pengoordinasian penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. pengoordinasian penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. pengoordinasian penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. pengoordinasian penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- g. pengoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. pengoordinasian penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. pengoordinasian penyiapan dan sinkronisasi penerapan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. pengoordinasian sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- k. pengkoordinasian penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. pengkoordinasian penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - m. pengkoordinasian penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n. pelaksanaan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai tugas pendataan, perencanaan, penyediaan pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data;
- b. pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan, data dan informasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. pengoordinasian penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- e. pengoordinasian penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- f. pengoordinasian penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- g. pengoordinasian penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- h. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Sumber daya manusia merupakan modal dasar bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok pada Tahun 2025 didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 47 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 orang Non ASN (pegawai kontrak dan PHL) yang tersebar di 4 bidang dan 1 kesekretariatan, dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN (PNS dan PPPK)	16	31	47
2.	Non ASN (pegawai kontrak dan PHL)	17	20	37
	Total	33	51	84

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos PPPA, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok didominasi oleh perempuan.

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	S3			
2	S2	7		7
3	S1	32	17	49
4	D3	2		2
5	SMA	5	19	24
6	SMP		1	1
7	SD	1		1
	Total	47	37	84

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos PPPA, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan pada ASN dan Non ASN didominasi oleh S1 dan SMA. Dominasi lulusan SMA dan SMP pada Non ASN adalah untuk mengisi posisi seperti tenaga administrasi dasar, petugas kebersihan, yang hanya membutuhkan keterampilan dasar yang dapat dipenuhi oleh lulusan SMA/SMK. Untuk ASN dengan tingkat Pendidikan SD untuk posisi penjaga Taman Makam Pahlawan (TMP).

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1		1
2	Administrator	5		5
3	Pengawas	1		1
4	Penyuluh Sosial Ahli Madya	2		2
5	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	3		3
6	Perencana Ahli Muda	2		2
7	Pekerja Sosial Ahli Muda	2		2
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4		4
9	JFT Ahli Pertama	6		6
10	Staf/Pelaksana	21	37	58
	Jumlah	47	37	84

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos PPPA, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok telah di dukung oleh jabatan fungsional yaitu Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Madya, Perencana Ahli Muda, Penyuluh Sosial Ahli Muda dan Fungsional Analisis Kebijakan Muda.

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, baik ASN maupun Non ASN yang ada saat ini secara maksimal dapat mencapai kinerja organisasi. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi

standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan dua komponen penting yang mendukung kelancaran operasional sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, sarana mengacu pada peralatan, fasilitas, dan alat-alat yang digunakan di dalam kantor untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, seperti komputer, meja, kursi, dan alat tulis. Sedangkan prasarana merujuk pada infrastruktur yang lebih besar dan mendasar, seperti bangunan kantor, listrik, , dan fasilitas umum yang diperlukan untuk menunjang kegiatan kantor.

Kedua aspek ini, sarana dan prasarana, bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan nyaman bagi para karyawan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik juga mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, mengingat kenyamanan dan kelancaran operasional kantor dapat meningkatkan kepuasan kerja dan efektivitas tim. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memastikan bahwa fasilitas ini tersedia dengan baik dan terawat, sehingga mendukung keberhasilan kegiatan bisnis dan tujuan organisasi.pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Tahun 2024**

NO	SPESIFIKASI BARANG (Nama/ Jenis Barang)	JUMLAH BARANG (UNIT)	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
	ASET TETAP				
	TANAH				
	TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	V		
2	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1	V		
	PERALATAN DAN MESIN				
	ALAT BESAR				
	ALAT ANGKUTAN				
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2		
2	Pick Up	1	1		
3	Sepeda Motor	9	9		
4	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	2	2		
5	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1	1		
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	3		
2	Lemari Kayu	11	10	1	
3	Filing Cabinet Besi	13	13		
4	Brandkas	2	2		
5	Lemari Kaca	3	3		

NO	SPESIFIKASI BARANG (Nama/ Jenis Barang)	JUMLAH BARANG (UNIT)	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
6	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	1		
7	CCTV - Camera Control Television System	3	3		
8	Peta	1	1		
9	Mesin Absensi	1	1		
10	LCD Projector/Infocus	1	1		
11	Papan Nama Instansi	2	2		
12	Papan Pengumuman	3	3		
13	Alat Kantor Lainnya				
14	Meja Rapat	2	2		
15	Meja 1/2 Biro	20	20		
16	Kursi Tamu	7	7		
17	Bangku Tunggu	3	3		
18	Meubeleur lainnya (kursi eselon ii)	1	1		
19	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		
20	Mesin Pemotong Rumput	3	3		
21	Lemari Es	1	1		
22	A.C. Sentral	1	1		
23	A.C. Window	7	7		
24	A.C. Split	3	3		
25	Kipas Angin	4	4		
26	Alat Dapur lainnya	1	1		
27	Televisi	3	3		
28	Sound System	2	2		
29	Wireless	1	1		
30	Acces Point AC	1	1		
31	Microphone	1	1		
32	Microphone Table Stand	4	4		
33	Unit Power Supply	6	6		
34	Camera Video	1	1		
35	Dispenser	2	2		
36	Mimbar/Podium	1	1		
37	Handy Cam	1	1		
38	Karpet	3	3		
39	Vertikal Blind	1	1		
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain (antena parabola)	1	1		
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3		
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3		
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7		
46	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	1		
47	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3		
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Microphone/Wireless MIC	1	1		
2	Telephone Mobile	2	2		
3	Handy Talky (HT)	9	9		
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
1	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	4	4		
	KOMPUTER				
1	P.C Unit	14	14		
2	Lap Top	16	16		

NO	SPESIFIKASI BARANG (Nama/ Jenis Barang)	JUMLAH BARANG (UNIT)	KEADAAN BARANG		
			BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)
3	Hard Disk	1	1		
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	20		
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
	BANGUNAN GEDUNG				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
2	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	1		
3	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1		
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	1		
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (pagar permanen tmp)	1	1		
	MONUMEN				
1	Tugu Peringatan Lainnya	1	1		

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Sosial, 2024

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Gambaran Aset dan Sarana Prasarana DPMPPA Tahun 2024

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah Aset tahun Ini	Kondisi (baik /rusak)	Jumlah yang diinginkan tahun akhir renstra
	Tanah				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1		
	Alat Angkutan				
1	Kendaraan Roda 4	Unit	7	baik	
2	Kendaraan Roda 2	Unit	8	baik	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Mesin Ketik Manual	Buah	1	baik	
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	1	baik	
3	Filling Kabinet Besi	Buah	8	baik	
4	Lemari Arsip	Buah	7	baik	
5	Meja ½ Biro	Buah	20	baik	
6	Kursi Rapat	Buah	25	baik	
7	Kursi Putar	Buah	3	baik	
8	Kursi Biasa	Buah	2	baik	
9	Bangku Tunggu	Buah	2	baik	
10	Sofa	Buah	1	baik	
11	Lemari Es	Buah	1	baik	
12	AC plit	Buah	7	baik	
13	Televisi	Buah	1	baik	
14	Sound System	Buah	1	baik	
15	Wireless	Buah	1	baik	
16	Camera Video	Buah	3	baik	
17	Dispenser	Buah	1	baik	
18	Karpet	Buah	4	baik	
19	Gorden	Buah	4	baik	
20	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	baik	

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah Aset tahun Ini	Kondisi (baik /rusak)	Jumlah yang diinginkan tahun akhir renstra
21	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	5	baik	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	21	baik	
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	14	baik	
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Buah	2	baik	
25	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	5	baik	
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				
1	Microphone/Wireless MC	Buah	2	baik	
2	Alat Studio Lainnya	Buah	1	baik	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan				
1	Termometer Mercuty untuk Suhu Badan	Buah	1	baik	
	Komputer				
1	Komputer Jaringan Lainnya	Unit	1	baik	
2	PC Unit	Unit	9	baik	
3	Laptop	Unit	5	baik	
4	Hard Disk	Unit	1	baik	
5	Printer	Unit	11	baik	
6	Modem	Unit	1	baik	
	Peralatan Olahraga				
1	Peralatan Olahraga	Buah	12	baik	
	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung		1	baik	
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
1	Alat Musik Tradisional	Set	2	baik	
2	Alat Musik Modern	Set	5	baik	

Sumber : Sumber: Laporan Keuangan Dinas PMPPA, 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, kelompok sasaran layanan Dinas adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat. Jenis layanan dinas merujuk pada berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung tercapainya kesejahteraan umum. Setiap jenis layanan dinas memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup, maupun mendukung keberlanjutan program-program pemerintah, serta merumuskan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender serta pengolahan data, informasi, kerjasama dan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Tetapi IPM mengabaikan disparitas gender. Padahal kesenjangan gender masih banyak terjadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kualitas kesehatan dan pendidikan laki-laki dan perempuan tidak sama. Oleh karena itu untuk melengkapi perhitungan IPM dimasukkan aspek pembangunan gender.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak.

Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Secara umum, angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya dan peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perlindungan sosial hadir untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti keluarga miskin, pekerja informal, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar Indonesia mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi miskin. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- Pasal 27 ayat (2): Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 34 ayat (1): Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi fakir miskin dan anak terlantar.
- Pasal 34 ayat (3): Negara memberikan jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan mengatur secara khusus tentang upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur dalam UU ini antara lain:

- Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta.
- Penanganan kemiskinan harus berbasis pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- Pemerintah daerah diminta untuk membuat rencana dan program yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Angka Kemiskinan dan persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan dua indikator yang saling berkaitan erat dalam upaya mencapai perlindungan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, perlu ada penurunan yang signifikan baik dalam angka kemiskinan maupun jumlah PPKS. Keduanya memerlukan kebijakan yang fokus pada pemberian bantuan sosial yang efektif, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses dasar yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Angka Kemiskinan mengukur persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang artinya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu atau kelompok yang membutuhkan intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik berupa bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial lainnya. Dengan meningkatnya perlindungan sosial, diharapkan kedua indikator ini angka kemiskinan dan PPKS dapat menurun secara signifikan.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Sosial pada Dinas Sosial
Kota Solok Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Cat. Analisis
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Indikator Kinerja RPJMD																				
1	Angka Kemiskinan	%			2,77	2,62	2,47	2,32	2,17			3,02	3,05	3,07					58,52	
2	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%				4,29	8,58	12,87	17,16			21,65	33,08	42,60					248,25	
Indikator Kinerja Renstra																				
1	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	%				77,52	83,12	88,71	94,31		100	84,74	94,3	75,07		129	101,95	106,3	79,6	
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Persentase penurunan data error DTKS	%				13,37	9,7	6,33	3,14		0,40	1,09	3,19	0,56		197,01	188,76	149,61	182,27	
Indikator SPM																				
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Cat. Analisis
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Wilayah Kab/ Kota	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator IKK																			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%			100	100	100	100	100											
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial, 2024.

Dari tabel dapat dilihat, indikator kinerja Angka Kemiskinan untuk tahun 2023 ditargetkan 2,32 sedangkan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 3,05 dengan tingkat capaian 68,53%. Untuk tahun target sebesar 2,17 dengan realisasi 3,07 (data per 30 November 2024,BPS) dengan tingkat capaian 58,52%. Indikator kinerja Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk tahun 2023 ditargetkan 12,87 sedangkan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 33,08 dengan tingkat capaian 271,59%. Untuk tahun 2024 target 17,16% dan realisasi sebesar 42,60 dengan tingkat capaian kinerja adalah 248,25%. Artinya sampai dengan Tahun 2024 Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah terealisasi sebesar 42,60%.

Data PPKS diperoleh dari Pencatatan dan Pendataan oleh Dinas Sosial, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data dari Pencatatan dan Pendataan oleh Dinas Sosial ini diverifikasi, validasi dan asistensi data PPKS oleh Dinsos dengan PSM Kelurahan, sedangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi data, rekonsiliasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan operator SIKS-NG Kelurahan

Dari capaian kinerja di atas, dapat dibandingkan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun dari Tahun 2020 s.d 2024 (**sesuai IKU Renstra**) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang berfluktuatif. Tahun 2021-2023 capaian kinerjanya melebihi 100%, namun untuk tahun 2024 hanya sebesar 79,60%. Ini disebabkan keterbatasan anggaran pada tahun 2024, sehingga berkurangnya dana untuk program PPKS. Keterbatasan dana ini menyebabkan pemerintah tidak dapat mengakses atau mengalokasikan bantuan kepada jumlah penerima yang lebih besar.

Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif menunjukkan capaian yang maksimal (100%) setiap tahunnya. PSKS digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial. Melalui PSKS, pemerintah dan lembaga terkait dapat memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, seperti keluarga miskin, individu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan lainnya. Dalam program-program bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PSKS menjadi dasar untuk menentukan penerima yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. PSKS membantu pemerintah dalam melakukan pemetaan terkait tingkat kesejahteraan sosial di suatu daerah. Dengan data PSKS, dapat diketahui secara lebih jelas kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti kelompok yang

rentan miskin, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan potensi masalah sosial lainnya.

Indikator Kinerja Persentase penurunan data error DTKS menunjukkan capaian yang tinggi setiap tahunnya/melebihi 100%. Tercapainya indikator ini karena Dinas Sosial setiap tahunnya melakukan pembaharuan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi dan validasi data, rekonsiliasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan operator SIKS-NG Kelurahan sehingga Data error adalah data anomali yang merupakan data tidak jelas alamat, wilayah dan alamat masyarakat yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diminimalisirkan.

Adapun indikator kinerja untuk **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok meliputi indikator yang berkaitan dengan aspek Gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Predikat Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dengan demikian maka kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG menunjukkan kesenjangan pembangunan dalam sektor lapangan pekerjaan dan pendapatan, dimana nilainya sampai saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, IDG terdiri dari persentase perempuan yang bekerja di parlemen, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja profesional, jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta sumbangan pendapatan perempuan yang umumnya nilainya lebih rendah dibanding laki-laki. Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diartikan setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak-anak yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, Kekerasan Perempuan dan anak yang terjadi akan mempunyai efek negatif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dan juga merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan karena berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, mengganggu kesehatannya, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya.

4. Predikat Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas : (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya , (4) Utama, (5) Kota Layak Anak. Dalam penetapan peringkat KLA akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA. Tingkat/Peringkat Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan skor hasil evaluasi KLA : (1) Pratama 500-600, (2) Madya 600-700, (3) Nindya 700-800, (4) Utama 800-900, (5) Kota Layak Anak 900-1000.

Pencapaian Kinerja Pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Perangkat Daerah Kota Tahun 2021-2024 terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMPA Kota Solok
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke 2021-2024				Realisasi Capaian pada Tahun ke 2021-2024				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%			97,18	97,32	97,32	97,72	97,05	97,05	96,67	96,67	99,86	99,72	99,33	98,92
2	Indeks Perlindungan Anak				665 (Madya)	715 (Nindya)	765 (Nindya)	795 (Nindya)	665 (Madya)	718 (Nindya)	787 (Nindya)	844 (Nindya)	100	100,42	102,88	106,16
3	IDG	%			58,47	58,89	59,31	60,15	63,09	63,09	63,61	64,23	107,90	107,13	107,25	106,78
4	Persentase partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional	%			61,33	62,83	64,33	67,33	55,66	55,66	38,15	41,28	90,75	88,58	59,30	61,31
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%			10	10	10	15	10	10	10	15	100	100	100	100
6	Sumbangan pendapatan perempuan	%			36,56	36,66	36,75	36,95	50,10	50,10	26,48	26,05	137,03	136,66	72,05	70,50
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%			60,73	55,29	50,04	40,08	18,26	18,11	48,69	68,12	30,06	32,75	97,30	169,96
8	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%			41,33	42,66	43,75	45,43	55,66	55,66	42,32	43,04	134,67	130,47	96,73	94,74
9	Persentase penurunan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			5,88	11,76	17,65	29,41	38,68	38,69	51,06	89,21	657,82	329	289,29	303,33
10	Persentase OPD yang sudah melaksanakan	%			96,67	100	100	100	93,33	96,67	100	100	96,54	96,67	100	100

	PUG melalui PPRG															
11	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%			83,87	87,10	87,10	87,10	100	100	100	100	119,22	114,81	114,81	114,81
12	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	%			4,45	4,95	7,95	10,95	3,67	7,21	4,77	5,06	82,47	145,66	60	46,21
13	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase peningkatan ketahanan keluarga	%			-	20,46	44,09	44,19	-	71,04	80	80	-	347,21	181,44	181,04
15	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	%			93,33	96,67	96,67	100	80	96,67	100	100	85,71	100	103,44	100
16	Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	%			66,67	73,33	80	88,67	66,67	76,67	81	83,87	100	104,55	101,25	112,77
17	Predikat Kota Layak Anak				Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	100	100	100	100
18	Persentase kelembagaan anak yang aktif	%			57,89	60	70	80	100	100	100	100	172,74	166,67	142,86	125
19	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase PKK Aktif	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Pentingnya layanan dinas terletak pada peranannya dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adil dan efisien. Pengelolaan yang baik atas berbagai jenis layanan dinas akan meningkatkan kepuasan publik dan menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan warga negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Layanan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis layanan Sosial Kota Solok ada 14 (empat belas), antara lain:

1. Pendampingan Anak yang berhadapan dengan Hukum Surat Tugas Sakti Peksos/melalui sakti peksos
2. Program Sembako/ BPNT
3. Surat Keterangan DTKS
4. Pemberian Bantuan Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu
5. Pelayanan Istana Lansia
6. Surat tanda daftar Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS)
7. Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8. Home Visit dan Konseling (Tersedia konseling keliling)
9. Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Mayat Terlantar
10. Surat Rekomendasi Orang Terlantar
11. Pengangkatan Anak
12. Keterangan Individu/Keluarga Terdaftar DTKS (untuk Pengurusan KIP, Subsidi Air & Subsidi Listrik), BPJS Kesehatan (PBI JKN & JKSS), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH & Bansos Lainnya
13. Pelayanan pendistribusian Rantang Peduli ke rumah lansia terlantar
14. BPJS Gratis (dibayarkan oleh pemerintah)

Dalam pelaksanaan urusan bidang sosial, sasaran layanannya adalah dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu atau kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan dan pelayanan

kesejahteraan sosial karena kondisi atau situasi yang mereka hadapi. Data PPKS adalah data tentang orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan sosial. Data PPKS menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima pelayanan berdasarkan SPM Bidang Sosial. Berdasarkan hasil pendataan PPKS yang terdiri dari 26 kategori di Kota Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
REKAPITULASI DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
KOTA SOLOK TAHUN 2020 s/d 2024

NO	JENIS PMKS/PPKS	SATUAN	2020	2021		2022		2023		2024	
			Jumlah	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	Orang	29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Anak Terlantar	Orang	335	368	281	150	150	66	43	66	43
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	18	19	11	23	23	10	10	12	12
4	Anak Jalanan	Orang	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas	Orang	56	64	6	49	17	58	13	58	13
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	6	6	26	26	0	0	18	18
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	798	736	495	298	240	196	196	196	196
9	Penyandang Disabilitas	Orang	221	357	144	348	114	242	140	242	140
10	Tuna Susila	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	Orang	3	4	9	1	0	0	0	0	0
12	Pengemis	Orang	15	14	0	25	25	13	9	13	9
13	Pemulung	Orang	46	48	26	46	0	29	19	29	19
14	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	Orang	61	63	14	63	0	31	14	31	14
16	Orang Dengan HIV / AIDS	Orang	0	6	0	19	19	8	8	8	8
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	53	59	0	60	0	18	11	18	11
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	1	0	0	1	0	17	17	18	18
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	0	0	0	0	1	0	1	0
21	Korban Bencana Alam	Orang	1300	1711	1711	867	867	12	12	710	710
22	Korban Bencana Sosial	Orang	26	13	13	35	35	13	13	2	2
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	410	469	222	287	212	219	132	219	132
24	Fakir Miskin	KK	2496	2731	1852	1562	1543	1213	803	1213	813
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikolog	KK	76	0	0	0	0	12	3	12	3
26	Komunitas Adat Terpencil	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		5946	6668	4790	3860	3271	2159	1444	2867	2162

Sumber : Hasil Pendataan dan DTKS yang telah diolah (Verval) Dinas Sosial, 2024.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

“Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Perwujudan dari dipelihara adalah dengan menyediakan pelayanan dasar untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang kemudian pasal tersebut diturunkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri sesuai dengan bidang masing-masing agar memperjelas pelaksanaannya di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Penerima pelayanan dasar adalah Seluruh warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan Pelayanan Dasar.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 10 ayat 2 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas: a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. SPM bidang Sosial diperjelas secara teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perspektif penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial, SPM menjadi acuan pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam bidang sosial dan acuan pengalokasian anggaran yang lebih strategis dan efektif. penerapan SPM bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dalam menerapkan SPM merupakan manajemen pelayanan publik yaitu perencanaan, penganggaran, implementasi, serta monitoring dan evaluasi di tingkat dinas, daerah, dan unit layanan (Puskesmas)

secara lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Sampai sejauhmana penerpan SPM ini telah dilaksanakan, dan bagaimana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.

Jenis layanan dan kelompok sasaran untuk Capaian penyelenggaraan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari indikator-indikator berikut :

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja
1	Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi program kesetaraan dan keadilan gender Fasilitasi upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG 	<ol style="list-style-type: none"> SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Organisasi Perempuan Organisasi Masyarakatan Tokoh Agama Tokoh Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Meningkatnya perempuan berperan sebagai pengambil keputusan dalam politik dan lembaga publik Meningkatnya organisasi perempuan Meningkatnya anggaran berbasis gender Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian keluarga
2	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Data	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi program yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak Fasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Koordinasi program yang berkaitan data informasi tentang pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Fasilitasi upaya menghimpun data dan informasi peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Organisasi perempuan Organisasi masyarakat Peduli Anak Tokoh Agama/Masyarakat Forum anak 	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Terpenuhinya hak anak Kota Solok Meningkatnya anak yang berprestasi Terhimpunnya data base tentang perempuan dan anak Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan Ketersedian data dan informasi perempuan dan anak yang akurat Tersusunnya profil gender

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok terkait dengan pemberian pelayanan urusan bidang Sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah merupakan tempat koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program dalam layanan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
2. Organisasi Masyarakat menjadi perpanjangan tangan dalam pelaksanaan program-program sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
3. Kepolisian merupakan wadah penanganan kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak serta memberikan perlindungan hukum bagi korban.
4. Rumah Sakit Umum merupakan wadah penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dalam hal pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan medikolegal).
5. Instansi Vertikal merupakan wadah penanganan masalah sosial, penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak.
6. Masyarakat merupakan wadah dalam penggalangan dana, pelayanan sosial dan kegiatan sukarela.

2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran sentral dalam membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak untuk menjalankan mandatnya dalam bidang kesejahteraan sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk-bentuk kerja sama ini sangat vital untuk mengatasi kompleksitas masalah dan memastikan pelayanan yang komprehensif

Untuk urusan Sosial,

Kerja Sama Internal Pemerintah Daerah

Dinas akan selalu berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan pemerintahan daerah yang sama. Ini penting karena masalah sosial seringkali saling terkait dengan sektor lain. Contohnya:

- **Dinas Kesehatan:** Bekerja sama dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan, seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau lansia terlantar, termasuk rujukan dan program rehabilitasi.
- **Dinas Pendidikan:** Berkolaborasi dalam program pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas atau penanganan anak-anak yang putus sekolah.

- **Dinas Tenaga Kerja:** Menjalin kerja sama dalam program pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi kelompok rentan, seperti mantan narapidana atau penyandang disabilitas.
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):** Dinas memiliki peran kunci dalam penanganan korban bencana, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pendampingan psikososial, hingga pemenuhan kebutuhan dasar pasca-bencana.
- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Kerja sama ini memastikan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akurat, sehingga bantuan dan program dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
- **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah:** Sinergi program untuk menyalurkan bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan.

Kerja Sama Antar-Daerah

Dinas juga seringkali menjalin kerja sama dengan Dinas atau instansi terkait di daerah lain. Ini krusial untuk penanganan masalah sosial yang bersifat lintas wilayah, seperti:

- **Penanganan PPKS Lintas Batas:** Misalnya, penanganan gelandangan, pengemis, atau korban perdagangan orang yang bergerak antar-daerah.
- **Berbagi Praktik Terbaik dan Sumber Daya:** Saling bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya dalam mengembangkan program kesejahteraan sosial yang inovatif.
- **Penanganan Bencana Lintas Daerah:** Jika bencana berdampak pada beberapa wilayah, Dinsos dari daerah yang berbeda dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan dan rehabilitasi.

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Bentuk kerja sama ini melibatkan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), perguruan tinggi, hingga sektor swasta. Tujuannya adalah memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan Dinas:

- **Organisasi Sosial/LSM:** Berkolaborasi dengan panti asuhan, panti jompo, yayasan disabilitas, atau organisasi pemerhati anak dalam menyediakan layanan sosial, rehabilitasi, atau pemberdayaan.
- **Perguruan Tinggi:** Menjalin kerja sama dalam penelitian, pengembangan model intervensi sosial, atau program magang bagi mahasiswa pekerja sosial.
- **Sektor Swasta/CSR (Corporate Social Responsibility):** Menggandeng perusahaan untuk berkontribusi dalam program-

program sosial, seperti penyediaan bantuan, pelatihan, atau pembangunan fasilitas sosial.

- **Lembaga Hukum (Kejaksaan, Kepolisian):** Berkolaborasi dalam penanganan masalah hukum yang melibatkan PPKS, seperti korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum. Contohnya, perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
- **BPJS Kesehatan:** Kerja sama dalam penyediaan informasi status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat, khususnya PPKS, serta sosialisasi program JKN.

Dinas memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinsos tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus menjalin **kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat**, terutama dengan **Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI)**.

Bentuk-Bentuk Kerja Sama dengan Pusat

Kerja sama Dinas dengan pemerintah pusat umumnya berbentuk **koordinasi program, penyaluran bantuan, pengembangan kapasitas, dan sinkronisasi data**. Berikut rinciannya:

- **Penyaluran Program Bantuan Sosial Nasional:** Ini adalah bentuk kerja sama paling signifikan. Dinas berperan sebagai **ujung tombak** di daerah untuk berbagai program bantuan sosial dari Kemensos RI, seperti:
 - **Program Keluarga Harapan (PKH):** Dinas bersama pendamping PKH di lapangan melakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendampingi KPM, dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
 - **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako:** Dinas membantu dalam proses pemutakhiran data penerima, koordinasi dengan e-warong, dan memastikan distribusi sembako berjalan lancar.
 - **Bantuan Sosial Tunai (BST):** Meskipun BST merupakan program ad-hoc, Dinas menjadi garda terdepan dalam proses pendataan, verifikasi, dan koordinasi penyaluran dana.
 - **Bantuan Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial):** Dinas menerima mandat dari Kemensos untuk menyalurkan bantuan atensi kepada individu atau kelompok dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak yatim/piatu, atau korban bencana. Ini bisa berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, alat bantu, atau modal usaha.
- **Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):** Dinas adalah **penanggung jawab utama di daerah** dalam mengelola DTKS, yang merupakan basis data

nasional untuk program kesejahteraan sosial. Dinsos secara berkala melakukan:

- **Verifikasi dan validasi data:** Memastikan data penduduk miskin dan rentan yang tercatat di DTKS sesuai dengan kondisi di lapangan.
- **Usul-sanggah data:** Memfasilitasi masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data di DTKS melalui aplikasi Cek Bansos atau mekanisme yang ditentukan.
- **Sinkronisasi data:** Mengirimkan hasil pemutakhiran data ke Kemensos RI untuk sinkronisasi dan penetapan penerima bantuan. Data yang akurat sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
- **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial:** Dinas berkoordinasi dengan sentra-sentra rehabilitasi sosial milik Kemensos RI yang tersebar di berbagai wilayah. Kerja sama ini mencakup:
 - **Rujukan PPKS:** Merujuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang membutuhkan rehabilitasi khusus ke sentra-sentra milik Kemensos.
 - **Pelaksanaan program bersama:** Mengembangkan dan melaksanakan program rehabilitasi sosial di daerah dengan dukungan teknis dan finansial dari pusat.
- **Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Kemensos RI seringkali menyelenggarakan **pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi** bagi aparatur Dinas di daerah, termasuk pendamping sosial. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial.
- **Koordinasi Penanganan Bencana:** Dalam situasi bencana, Dinas berkoordinasi erat dengan Kemensos RI dalam hal:
 - **Pendataan korban dan kebutuhan:** Mengumpulkan data kebutuhan dasar dan masalah sosial yang muncul akibat bencana.
 - **Penyaluran bantuan logistik:** Menerima dan mendistribusikan bantuan logistik dari Kemensos RI kepada korban.
 - **Pendampingan psikososial:** Melakukan upaya pemulihan psikososial bagi korban bencana dengan panduan dari Kemensos.
- **Perumusan Kebijakan:** Dinas juga berperan dalam memberikan masukan dan umpan balik kepada Kemensos RI terkait efektivitas program dan kebutuhan di lapangan, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional.

Secara garis besar, semua bentuk kerja sama ini bertujuan untuk **meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesejahteraan sosial** serta **mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya** demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

- Menyusun kebijakan lokal yang berpihak pada perempuan dan anak.
- Mengintegrasikan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam RPJMD dan kegiatan OPD lainnya

Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Menjalankan program edukasi, penyuluhan, dan pendampingan bagi korban kekerasan.
- Meningkatkan akses layanan kesehatan, hukum, dan psikososial bagi perempuan dan anak.

Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan dan Komunitas

- Contohnya, perjanjian teknis antara DP3A dan Muslimat NU untuk kampanye “Jo Kawin Bocah” sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.
- Mendorong ketahanan keluarga dan kesetaraan gender berbasis nilai-nilai lokal.

Sinergi dengan Dunia Usaha

- Mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses modal.
- Mengembangkan lingkungan kerja yang ramah perempuan dan anak.

Kemitraan dengan Institusi Pendidikan

- Edukasi tentang hak anak dan kesetaraan gender di sekolah.
- Pencegahan kekerasan berbasis gender melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kerjasama Lintas Sektor

- Bersama Dinas Kesehatan, dan Kepolisian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Monitoring dan evaluasi program perlindungan anak secara terpadu.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada tabel berikut disajikan pemetaan permasalahan dalam pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah		
Urusan Sosial					
1.	Penanganan PPKS Belum Optimal	Masih Rendahnya Keakuratan Data	Verifikasi dan Validasi Data Belum Optimal		
			Belum Optimalnya Pengelolaan Data		
			Belum Adanya Regulasi Mengenai Standar Kemiskinan Kota Solok		
			Belum Optimalnya Fungsi Puskesmas		
		Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Belum Optimalnya Upaya Penanganan Masalah Psikososial dalam Masyarakat		
			Penerima Manfaat Tidak Tepat Sasaran (Bantuan Pusat)		
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Sosial		
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Jaminan Sosial		
2.	Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum Optimalnya Kinerja PSKS	Belum optimal proses rekrutmen PSKS		
			Belum Optimalnya Fungsi PSKS		
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Belum Optimalnya Peran Lembaga Sosial		
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Masyarakat		
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial		
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		1.	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kasus KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan anak	Lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan korban
Koordinasi antar lembaga masih lemah					
Kurangnya tenaga profesional					
2.	Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam usaha ekonomi produktif	Kurangnya akses perempuan terhadap pelatihan, modal, dan pemasaran		
3.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	Kurangnya komunikasi, edukasi dan informasi terhadap kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	Edukasi gender dan perlindungan anak belum masuk ke semua lapisan masyarakat		
			Keterbatasan media kampanye yang efektif		
4.	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak	Belum adanya memiliki UPTD PPA yang aktif dan berfungsi	Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam program dan kegiatan di masyarakat		
			Keterbatasan anggaran, SDM dan regulasi daerah		

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 (enam) permasalahan pokok dalam melaksanakan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni:

- a. Penanganan PPKS Belum Optimal
- b. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak
- f. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

2.2.2 Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya sangat signifikan bagi daerah tersebut. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pemerintahan daerah. Pemetaan isu strategis tersebut memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan social dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni:

Urusan Sosial :

- a. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Mencakup penguatan peran perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Pemberdayaan Sosial
Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka, seperti melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan bantuan teknis.
- c. Rehabilitasi Sosial
Penanganan bagi PPKS yang membutuhkan rehabilitasi, seperti korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial, seperti bencana alam, kemiskinan, dan penyakit. Jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan sosial kerja, dan jaminan sosial lainnya.
- e. Penanganan Fakir Miskin

Memberikan bantuan kepada fakir miskin, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan bantuan lainnya.

f. Penanganan Bencana Alam

Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, termasuk penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan, dan bantuan psikososial.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perundungan, dan kekerasan siber meningkat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan lemahnya layanan perlindungan korban.

b. Kurangnya Tenaga Profesional dalam Penanganan Kasus

Keterbatasan jumlah tenaga profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial masyarakat (PSM) menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan.

c. Rendahnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik.

d. Tingginya Angka Perkawinan Anak

Perkawinan usia anak masih tinggi, berdampak pada putus sekolah, kehamilan berisiko, dan kekerasan dalam rumah tangga dan didorong oleh kemiskinan, budaya, dan kurangnya edukasi reproduksi.

e. Lemahnya Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Sistem pelaporan, penanganan kasus, dan layanan rehabilitasi anak korban kekerasan belum berjalan optimal dan kurangnya tenaga terlatih seperti pendamping korban, konselor dan pekerja sosial.

f. Belum Optimalnya Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah masih lemah secara kapasitas dan kewenangan dan koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, hukum, sosial) kurang efektif.

g. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Layanan

Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti rumah aman dan fasilitas pendukung lainnya, masih terbatas. Hal ini menghambat proses pemulihan bagi korban kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Tabel 2.10
Pemetaan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Sosial						
<p>1. Pemberdayaan PSKS: Mencakup penguatan peran perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>2. Pemberdayaan Sosial: Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka, seperti melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan bantuan teknis.</p> <p>3. Rehabilitasi Sosial: Penanganan bagi PPKS yang</p>	<p>1. Penanganan PPKS Belum Optimal</p> <p>2. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>	<p>1. Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Dinas sering menangani isu kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan, yang dapat berdampak besar pada kualitas hidup masyarakat.</p> <p>2. Rendahnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan: Dinas dapat terlibat dalam program-program peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.</p> <p>3. Akses Air Bersih</p>	<p>1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat; - Dinas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perlindungan anak dan perempuan, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. - Isu-isu sosial yang melibatkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan fakir miskin juga menjadi fokus utama. - Dinas berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan bencana dan bantuan sosial</p>	<p>1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS): Isu ini mencakup penanganan berbagai kelompok yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar. Dinas memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok-kelompok ini.</p> <p>2. Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial: Isu ini berkaitan dengan upaya</p>	<p>1. Penanganan Fakir Miskin dan Kemiskinan: Isu ini mencakup upaya Dinas dalam mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, serta program-program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.</p> <p>2. Pemberdayaan Sosial: Dinas berperan penting dalam mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan usaha, dan peningkatan akses terhadap sumber daya.</p> <p>3. Rehabilitasi Sosial:</p>	<p>1. Penanganan PPKS: Ini melibatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial kepada PPKS.</p> <p>2. Pemberdayaan PPKS: Fokus pada meningkatkan kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar, menumbuhkan kepercayaan diri, dan meningkatkan potensi mereka.</p> <p>3. Perlindungan Sosial: Meliputi perlindungan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, serta jaminan sosial</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>membutuhkan rehabilitasi, seperti korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan korban bencana.</p> <p>4. Perlindungan dan Jaminan Sosial: Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial, seperti bencana alam, kemiskinan, dan penyakit. Jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan sosial kerja, dan jaminan sosial lainnya.</p> <p>5. Penanganan Fakir Miskin: Memberikan bantuan kepada fakir miskin, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan</p>		<p>dan Sanitasi: Isu ini penting karena terkait langsung dengan kesehatan masyarakat, dan Dinas dapat berperan dalam program penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.</p> <p>4. Keterlibatan Dinas: Dalam KLHS, Dinas berperan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mereka dapat memberikan masukan, solusi, dan rekomendasi untuk memantapkan program yang berkelanjutan.</p>	<p>yang tepat</p> <p>2. Penanganan Bencana: - Dinas berperan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, baik berupa bantuan materi maupun dukungan psikososial.</p> <p>3. Pelayanan Dasar Kesehatan dan Sosial: Dinas memberikan pelayanan dasar kepada lansia dan penyandang disabilitas, termasuk bantuan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial. Dinas juga menangani kasus anak terlantar dan tuna sosial, memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan</p>	<p>meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Dinas berperan dalam memfasilitasi proses graduasi, yaitu upaya agar keluarga penerima bantuan sosial dapat mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.</p> <p>3. Pelayanan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial: Isu ini mencakup berbagai pelayanan yang diberikan oleh Dinas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan</p>	<p>Isu ini fokus pada penanganan kelompok rentan yang mengalami masalah sosial, seperti anak jalanan, korban kekerasan, dan penyandang disabilitas. Dinas menyediakan layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat.</p> <p>4. Perlindungan dan Jaminan Sosial: Dinas bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial, seperti korban bencana, lansia, dan orang dengan penyakit menular. Jaminan sosial meliputi bantuan keuangan, bantuan pangan, dan layanan</p>	<p>keluarga.</p> <p>4. Jaminan Sosial: Ini mencakup program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS).</p> <p>5. Penanganan Kemiskinan: Melalui berbagai program bantuan sosial dan upaya pemberdayaan.</p> <p>6. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Penting untuk memastikan SDM Dinas memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.</p> <p>7. Peningkatan Kualitas Manajemen: Dinas juga perlu fokus pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>pangan, dan bantuan lainnya.</p> <p>6. Penanganan Bencana Alam: Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, termasuk penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan, dan bantuan psikososial.</p>			<p>4. Pemberdayaan Ekonomi: Dinas berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan Dinas juga terlibat dalam program graduasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial, membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.</p> <p>5. Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pelayanan: Dinas terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Dinas</p>	<p>sosial.</p>	<p>kesehatan.</p> <p>5. Penanganan Bencana: Dalam kasus bencana alam atau bencana lainnya, Dinas berperan dalam penanganan dampak bencana, seperti memberikan bantuan logistik, bantuan psikologis, dan pendampingan kepada korban.</p> <p>6. Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): DTKS adalah basis data yang memuat informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dinas memiliki peran penting dalam pengelolaan DTKS, termasuk pengumpulan data, pemeliharaan data, dan penggunaan data untuk perencanaan dan pelaksanaan</p>	<p>akuntabel.</p> <p>8. Penguatan peran keluarga: Memastikan keluarga dapat berperan aktif dalam kesejahteraan sosial anggota keluarga.</p> <p>9. Penanganan disabilitas: Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.</p> <p>10. Penanganan anak dan lansia terlantar: Memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak dan lansia terlantar.</p> <p>11. Penanggulangan bencana: Menyiapkan dan melaksanakan penanganan bencana alam dan bencana sosial.</p> <p>12. Pelayanan</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.		program kesejahteraan sosial. 7. Pendampingan Kelompok Rentan: Dinas juga memberikan pendampingan kepada kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mereka dapat mengakses layanan yang dibutuhkan.	kebutuhan dasar: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar PPKS dengan penerapan SPM.
Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan penggerak ekonomi 2. Peran tokoh adat dan agama serta budaya lokal 3. Ketersediaan data gender dan anak 4. Jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 3. Kurangnya akses perempuan terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Ketahanan sosial</u> : Pemberdayaan perempuan sebagai kunci ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis. 2. <u>Inklusi sosial dan gender</u> : Analisis dampak lingkungan dan pembangunan 	Ketimpangan Gender dan Agenda SDGs 2030 Komitmen terhadap SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).	Kekerasan Berbasis Gender dan Kebijakan Perlindungan Anak : Implementasi UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Urbanisasi dan Degradasi Sosial : Perempuan dan anak terdampak dalam wilayah urban miskin, perkampungan padat, dan wilayah pasca-konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak yang responsif dan terintegrasi 2. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik 3. Peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kelembagaan masyarakat	<p>ekonomi dan pelatihan</p> <p>4. Minimnya pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak di masyarakat</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di OPD</p> <p>Terbatasnya wadah partisipasi anak dalam pembangunan</p>	<p>terhadap kelompok rentan termasuk perempuan dan anak.</p> <p>3. <u>Keadilan akses terhadap SDA</u> : Memastikan akses air, energi, dan lahan tidak menimbulkan kerentanan baru terhadap perempuan dan anak.</p> <p>4. <u>Risiko bencana dan adaptasi</u> : Perempuan dan anak sering menjadi korban paling rentan dalam bencana</p>				<p>pelatihan dan fasilitasi usaha</p> <p>4. Peningkatan gender dan perlindungan perempuan dan anak melalui komunikasi, informasi dan edukasi</p> <p>5. Penguatan pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran di OPD</p> <p>Peningkatan peran anak melalui penguatan forum anak</p>

Isu-isu lingkungan dinamis sebagaimana tertuang pada tabel di atas secara langsung mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Perumusan strategi dalam Renstra perlu mempertimbangkan isu-isu ini untuk memastikan relevansi dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan tabel pemetaan di atas dirumuskanlah Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tantangan untuk diselesaikan pada periode Renstra 2025-2029 terutama dalam mengatasi permasalahan pokok yang dirumuskan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.11
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok

No	Permasalahan	Isu Strategis
Urusan Sosial		
1.	Penanganan PPKS Belum Optimal	Penanganan PPKS: Ini melibatkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial kepada PPKS.
		Pemberdayaan PPKS: Fokus pada meningkatkan kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar, menumbuhkan kepercayaan diri, dan meningkatkan potensi mereka.
		Perlindungan Sosial: Meliputi perlindungan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, serta jaminan sosial keluarga.
		Jaminan Sosial: Ini mencakup program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS).
		Penanganan Kemiskinan: Melalui berbagai program bantuan sosial dan upaya pemberdayaan.
		Penanganan disabilitas: Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
		Penanganan anak dan lansia terlantar: Memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak dan lansia terlantar.
		Penanggulangan bencana: Menyiapkan dan melaksanakan penanganan bencana alam dan bencana sosial.
		Pelayanan kebutuhan dasar: Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar PPKS dengan penerapan SPM.
2.	Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan Sumber Daya Manusia: Penting untuk memastikan SDM Dinas Sosial memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.
		Peningkatan Kualitas Manajemen: Dinas Sosial juga perlu sosial pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel.
		Penguatan peran keluarga: Memastikan keluarga dapat berperan aktif dalam kesejahteraan sosial anggota keluarga.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

1.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak yang responsif dan terintegrasi
2.	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik
3.	Kurangnya akses perempuan terhadap ekonomi dan pelatihan	Peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan dan fasilitasi usaha
4.	Minimnya pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak di masyarakat	Peningkatan gender dan perlindungan perempuan dan anak melalui komunikasi, informasi dan edukasi
5.	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di OPD	Penguatan pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran di OPD
6.	Terbatasnya wadah partisipasi anak dalam pembangunan	Peningkatan peran anak melalui penguatan forum anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Solok berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang social, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: **"Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Pemberdayaan Perempuan", dengan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial.**

Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif dan Pemberdayaan Perempuan berarti memastikan semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Sementara indikator berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

diukur Indeks Kesejahteraan Sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang rentan dan miskin. Ikesos tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi penentu kebijakan yang inklusif di berbagai sektor terkait kesejahteraan sosial. Ikesos memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui kebijakan dan program yang terarah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra adalah hasil yang terukur yang ingin dicapai oleh OPD dalam kurun waktu lima tahun sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan untuk mengatasi isu-isu strategis, menyelesaikan permasalahan, dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal dan mencapai target pembangunan daerah.

Penetapan sasaran ini harus:

- Spesifik (jelas dan tidak ambigu).
- Terukur (dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja).
- Dapat Dicapai (realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki).
- Relevan (sejalan dengan Tujuan OPD, Renstra, dan RPJMD).
- Memiliki Batasan Waktu (ditetapkan dalam periode Renstra 5 tahunan).

Melalui sasaran yang jelas dan terukur, OPD dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan fokus, efektif, dan efisien dalam berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran inilah yang akan menjadi tolak ukur utama keberhasilan kinerja OPD selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.2.08.0.00.34.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
- Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	58,09	58,09	58,50	59,50	60,50	61,50	62	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,70	72,65	74,60	76,55	78,50	80,45	82,40	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83	85	85,50	87,5	88	88,5	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,5	4,12	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18	
		Meningkatnya Penanganan PAS (Pemerlu Atensi Sosial)	Persentase PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang Mandiri (%)	-	3,57	7,41	11,54	16	20,83	26,09	
		Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,81	83,81	83,83	83,84	83,86	83,88	83,89	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	65,59	65,59	65,69	65,79	65,89	65,99	70	
		Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,147	0,147	0,145	0,143	0,142	0,14	0,138	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	96,64		96,95	97,04	97,13	97,22	97,31	97,4			

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Penanganan PAS (Pemerlu Atensi Sosial), dengan indikator: Persentase PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang Mandiri.
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan indikator: Persentase PSKS yang Aktif.
4. Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti table di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok

Tahap (I)	Tahap (II)	Tahap (III)	Tahap (IV)	Tahap (V)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Sosial				
Melakukan verval PAS secara rutin	Digitalisasi pendataan	Digitalisasi pendataan	Digitalisasi pendataan	Digitalisasi pendataan
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pembuatan standar kemiskinan kota Solok	Sosialisasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
Pelatihan teknis untuk petugas pendataan	Pelatihan teknis untuk petugas pendataan	Pelatihan teknis untuk petugas pendataan	Pelatihan teknis untuk petugas pendataan	Pelatihan teknis untuk petugas pendataan
Meningkatkan Perlindungan kepada PAS terlantar melalui bantuan Permakanan, sandang, alat bantu, dll	Meningkatkan Perlindungan kepada PAS terlantar melalui bantuan Permakanan, sandang, alat bantu, dll	Meningkatkan Perlindungan kepada PAS terlantar melalui bantuan Permakanan, sandang, alat bantu, dll	Meningkatkan Perlindungan kepada PAS terlantar melalui bantuan Permakanan, sandang, alat bantu, dll	Meningkatkan Perlindungan kepada PAS terlantar melalui bantuan Permakanan, sandang, alat bantu, dll

Tahap (I)	Tahap (II)	Tahap (III)	Tahap (IV)	Tahap (V)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan assesmen kebutuhan dasar PAS (komponen fakir miskin, wanita rentan ekonomi, disabilitas)	Penyediaan anggaran pemberdayaan sesuai asesmen (modal usaha/ pangan/ sandang, alat bantu)	Penyediaan anggaran pemberdayaan sesuai asesmen (modal usaha/ pangan/ sandang, alat bantu)	Penyediaan anggaran pemberdayaan sesuai asesmen (modal usaha/ pangan/ sandang, alat bantu)	Penyediaan anggaran pemberdayaan sesuai asesmen (modal usaha/ pangan/ sandang, alat bantu)
	Pelatihan dan pendampingan bagi penerima bantuan	Pelatihan dan pendampingan bagi penerima bantuan	Pelatihan dan pendampingan bagi penerima bantuan	Pelatihan dan pendampingan bagi penerima bantuan
	Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai penanganan masalah psikososial	Operasional	Layanan digital	Layanan digital
Penyuluhan bagi Masyarakat	Penyuluhan bagi Masyarakat	Penyuluhan bagi Masyarakat	Penyuluhan bagi Masyarakat	Penyuluhan bagi Masyarakat
Mengaktifkan fungsi PUSKESOS Kelurahan/	Bimtek bagi petugas Puskesmas	Rekonsiliasi data	Rekonsiliasi data	Rekonsiliasi data
Launching Puskesmas-SLRT Kelurahan	Pengadaan meja layanan yang memadai untuk Puskesmas Assyfa Dinsos	Peningkatan Mutu Layanan	Peningkatan Mutu Layanan	Peningkatan Mutu Layanan
Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah pusat mengenai penyediaan SHELTER multi layanan (rumah penampungan bencana, rumah aman/ perlindungan, istana lansia, rumah singgah)	Penyiapan Regulasi	Pengadaan Shelter	Operasional	Operasional
Perencanaan Penyediaan Gudang & logistik bencana	Penyediaan dan Operasional Lumbung Sosial Kecamatan (Logistik Bencana)	Penyediaan dan Operasional Lumbung Sosial Kecamatan (Logistik Bencana)	Penyediaan dan Operasional Lumbung Sosial Kecamatan (Logistik Bencana)	Penyediaan dan Operasional Lumbung Sosial Kecamatan (Logistik Bencana)
	Pelatihan Teknis bagi Pengurus Kampung Siaga Bencana	Operasional Kampung Siaga Bencana	Operasional Kampung Siaga Bencana	Operasional Kampung Siaga Bencana
	Pelatihan teknis untukTAGANA	Pelatihan teknis untukTAGANA	Pelatihan teknis untukTAGANA	Pelatihan teknis untukTAGANA
	Bimtek teknis bagi pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH)	Bimtek teknis bagi pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH)	Bimtek teknis bagi pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH)	Bimtek teknis bagi pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak				
Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pencegahan sejak dini, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan
Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak	Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak
Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan	Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan	Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan	Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan	Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan

Tahap (I)	Tahap (II)	Tahap (III)	Tahap (IV)	Tahap (V)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) serta pendidikan keluarga.	Penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) serta pendidikan keluarga.	Penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) serta pendidikan keluarga.	Penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) serta pendidikan keluarga.	Penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) serta pendidikan keluarga.
Penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).	Penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).	Penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).	Penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).	Penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA).
Advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web	Advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web	Advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web	Advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web	Advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web
Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan Kota Layak Anak	Menyusun, mereview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan Kota Layak Anak			
Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait tupaya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait tupaya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait tupaya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait tupaya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait tupaya perlindungan dan pemenuhan hak anak
Meningkatkan kapasitas fasilitator anak	Meningkatkan kapasitas fasilitator anak	Meningkatkan kapasitas fasilitator anak	Meningkatkan kapasitas fasilitator anak	Meningkatkan kapasitas fasilitator anak
Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak	Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak	Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak	Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak	Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak
Penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.	Penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.	Penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.	Penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.	Penguatan pokja, focal point optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender.
Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik	Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik	Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik	Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik	Pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik

Tahap (I)	Tahap (II)	Tahap (III)	Tahap (IV)	Tahap (V)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstrase cara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalnya NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Integrasi DTKS dengan sistem informasi daerah untuk mempercepat identifikasi penerima.	Meningkatkan jaminan dan bantuan sosial yang adaptif kepada lansia, disabilitas dan PPKS	Peningkatan Capaian SPM untuk Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
2	Kemitraan dengan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk memperluas jangkauan layanan sosial		Peningkatan Capaian SPM untuk Korban Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
			Peningkatan Pendampingan terhadap PAS dan Keluarga PAS	
			Peningkatan Pendampingan Terhadap Korban Bencana	
3	Digitalisasi layanan sosial	Meningkatkan satu data penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir	Peningkatan Kualitas Layanan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan Puskesmas Kelurahan	
4	Pembentukan UPTD dan LKS untuk layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat	Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang tepat Sasaran	
5	Pembentukan dan penguatan UPTD PPA di kabupaten/kota.	Meningkatkan pemberdayaan kepala keluarga perempuan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	
6	Pelatihan SDM layanan PPA: termasuk psikolog, pekerja sosial, dan paralegal	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	Peningkatan akses terhadap anak guna mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak	
7	Kemitraan dengan LSM, dunia usaha, dan media	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	
			Melakukan pembinaan dan keterampilan teknis bagi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

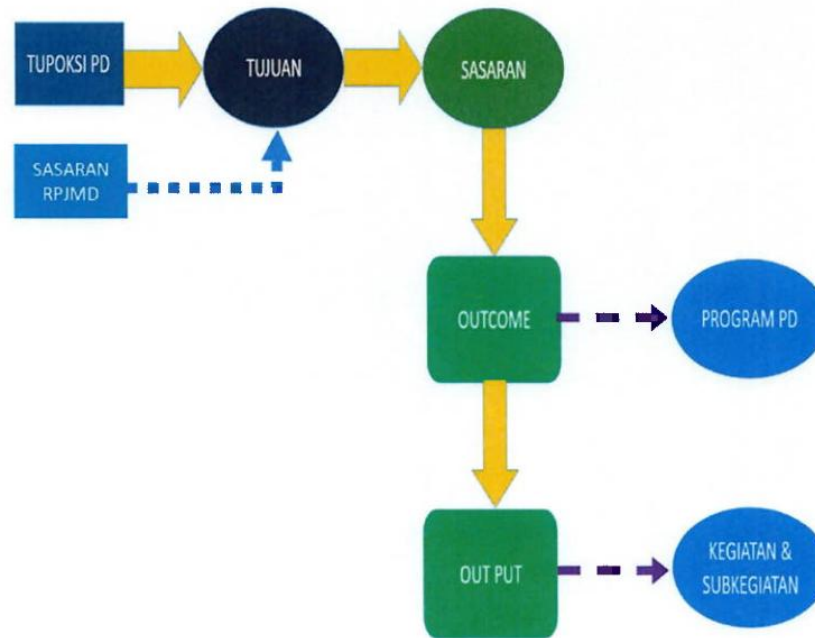
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025 - 2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan Inmen Nomor 2 Tahun 2025, program/kegiatan/subkegiatan dirumuskan berdasarkan kerangka perumusan pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Solok



Selanjutnya kerangka ini diturunkan pada teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Pemberdayaan Perempuan				Indeks Kesejahteraan Sosial			
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			
					Indeks Pelayanan Publik			
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Sub Kegiatan : Penyediaan	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tangga	Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jumlah Mebel yang Dipelihara - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah			<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD - Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD - Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD - Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD 	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya Penanganan PAS (Pemerlu Atensi Sosial)			Persentase PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang Mandiri		
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		1. Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	
					2. Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					3. Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					4. Persentase PPKS Lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					5. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Panti Sosial	2. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					4. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
					5. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
					6. Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
					7. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
					8. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					9. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					10. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					11. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					12. Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		
					13. Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi		
					14. Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota		
					15. Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					2. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
					4. Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		
					5. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					6. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
					7. Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		
					8. Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		
					9. Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					10. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
					11. Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					12. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		
					13. Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota		
					14. Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		
					15. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi		
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
				Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Sub Kegiatan Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3. Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
				Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 2. Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4. Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 5. Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota 6. Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
				Terpenuhinya keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Program Penanganan Bencana	
					1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		
					2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
					3. Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					2. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
					3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					4. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
					5. Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					2. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
					3. Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas		
					4. Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi		
					5. Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi		
					6. Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan		
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam		
				Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana		
				Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		
				Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Sub Kegiatan Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana		
		Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial			1. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
						2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 4. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 5. Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi 6. Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					7. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		
					8. Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		
					9. Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Sub Kegiatan : Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Sub Kegiatan : Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					2. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
						2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		Meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)			
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota - Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota 	<p>Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah KIE Perlindungan khusus anak - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota - Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Sub Kegiatan : Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan			- Proporsi Perempuan Pada Legislatif - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) - Persentase Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional - Sumbangan Pendapatan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		- Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan - Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Sub Kegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi - Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					bimtek atau pelatihan		
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatnya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok, berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.901.832.465,00		7.995.312.861,00		8.286.882.852,00		8.331.558.580,00		8.376.904.443,00	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.629.608.265,00		6.723.088.661,00		7.014.658.652,00		7.059.334.380,00		7.104.680.243,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.984.683.235,00		6.078.163.631,00		6.122.179.127,00		6.166.854.855,00		6.212.631.519,00	
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	5.981.583.235,00	100	6.075.063.631,00	100	6.119.079.127,00	100	6.163.754.855,00	100	6.209.531.519,00	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.874.230.383,00		4.967.710.779,00		5.011.726.275,00		5.056.402.003,00		5.102.178.667,00	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	30	4.873.930.383,00	30	4.967.410.779,00	30	5.011.426.275,00	30	5.056.102.003,00	30	5.101.878.667,00	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.873.930.383,00		4.967.410.779,00		5.011.426.275,00		5.056.102.003,00		5.101.878.667,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	30	4.873.930.383,00	30	4.967.410.779,00	30	5.011.426.275,00	30	5.056.102.003,00	30	5.101.878.667,00	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)												
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				129.770.875,00		129.770.875,00		129.770.875,00		129.770.875,00		129.770.875,00	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	129.770.875,00	1	129.770.875,00	1	129.770.875,00	1	129.770.875,00	1	129.770.875,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)												
	Jumlah Paket Barang Cetak dan		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penggandaan yang Disediakan (Paket)												
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)												
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.286.000,00		3.286.000,00		3.286.000,00		3.286.000,00		3.286.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	3.286.000,00	1	3.286.000,00	1	3.286.000,00	1	3.286.000,00	1	3.286.000,00	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.852.275,00		23.852.275,00		23.852.275,00		23.852.275,00		23.852.275,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	23.852.275,00	1	23.852.275,00	1	23.852.275,00	1	23.852.275,00	1	23.852.275,00	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.377.100,00		14.377.100,00		14.377.100,00		14.377.100,00		14.377.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	14.377.100,00	1	14.377.100,00	1	14.377.100,00	1	14.377.100,00	1	14.377.100,00	
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.317.500,00		7.317.500,00		7.317.500,00		7.317.500,00		7.317.500,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	7.317.500,00	12	7.317.500,00	12	7.317.500,00	12	7.317.500,00	12	7.317.500,00	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.938.000,00		80.938.000,00		80.938.000,00		80.938.000,00		80.938.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	80.938.000,00	12	80.938.000,00	12	80.938.000,00	12	80.938.000,00	12	80.938.000,00	
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0											
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Disediakan (Unit)												
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)												
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00		
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		823.014.992,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)													
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.974.992,00		61.974.992,00		61.974.992,00		61.974.992,00		61.974.992,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	61.974.992,00	12	61.974.992,00	12	61.974.992,00	12	61.974.992,00	12	61.974.992,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				761.040.000,00		761.040.000,00		761.040.000,00		761.040.000,00		761.040.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	761.040.000,00	12	761.040.000,00	12	761.040.000,00	12	761.040.000,00	12	761.040.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.866.985,00		147.866.985,00		147.866.985,00		147.866.985,00		147.866.985,00	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	27	147.866.985,00	27	147.866.985,00	27	147.866.985,00	27	147.866.985,00	27	147.866.985,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)												
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	17		20		20		20		20		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.666.985,0 0		130.666.985,00		130.666.985,0 0		130.666.985,0 0		130.666.985,0 0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	17	130.666.985,0 0	20	130.666.985,00	20	130.666.985,0 0	20	130.666.985,0 0	20	130.666.985,0 0	
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	27	17.200.000,00	27	17.200.000,00	27	17.200.000,00	27	17.200.000,00	27	17.200.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	16,3	17,1	3.100.000,00	17,5	3.100.000,00	17,9	3.100.000,00	18,3	3.100.000,00	18,7	3.100.000,00		
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,80		23,40		24		24,60		25,20			
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,80		23,40		24		24,60		25,20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	11,3	12		12,30		12,7		13		13,4		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		35	2.800.000,00	35	2.800.000,00	35	2.800.000,00	35	2.800.000,00	35	2.800.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		20		20		20		20		20		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4		3		3		3		3		
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		35	300.000,00	35	300.000,00	35	300.000,00	35	300.000,00	35	300.000,00	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.874.230.383,00		4.967.710.779,00		5.011.726.275,00		5.056.402.003,00		5.102.178.667,00	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam	100	100	134.800.000,00	100	134.800.000,00	100	134.800.000,00	100	134.800.000,00	100	134.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Pelayanan Sosial (%)													
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan				134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00		134.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)		52	134.800.000,00	52	134.800.000,00	52	134.800.000,00	52	134.800.000,00	52	134.800.000,00		
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)													
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	3.718												
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)													
	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)													
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1												
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)													
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Keluarga yang	3.718		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)													
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	9	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00	9	10.000.000,00		
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)													
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				124.800.000,00		124.800.000,00		124.800.000,00		124.800.000,00		124.800.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial		52	124.800.000,00	52	124.800.000,00	52	124.800.000,00	52	124.800.000,00	52	124.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota	Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)													
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				329.941.405,00		329.941.405,00		429.941.405,00		429.941.405,00		429.941.404,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	51	55	329.941.405,00	60	329.941.405,00	65	429.941.405,00	70	429.941.405,00	75	429.941.404,00	
	Persentase PPKS Lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	66	70		74		78		82		85		
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	66	66		70		80		90		100		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	70	80		90		100		100		100		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	50	60		70		80		90		100		
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				165.671.905,00		165.671.905,00		245.671.905,00		245.671.905,00		245.671.905,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial		2	165.671.905,00	2	165.671.905,00	2	245.671.905,00	2	245.671.905,00	2	245.671.905,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	(Orang)													
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		8		8		8		8		8			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		725		725		725		725		725			
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25		
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	12		12		12		12		12		
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	0	5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)													
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30		30		30		30		30			
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10		10		10		10		10			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				75.600.000,00		75.600.000,00		125.600.000,00		125.600.000,00		125.600.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	75.600.000,00	25	75.600.000,00	25	125.600.000,00	25	125.600.000,00	25	125.600.000,00		
1.06.04.2.01.0002 -				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Sandang														
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				10.500.000,00		10.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		8	10.500.000,00	8	10.500.000,00	8	30.500.000,00	8	30.500.000,00	8	30.500.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.220.000,00	5	1.220.000,00	5	1.220.000,00	5	1.220.000,00	5	1.220.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				14.476.905,00		14.476.905,00		14.476.905,00		14.476.905,00		14.476.905,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		30	14.476.905,00	30	14.476.905,00	30	14.476.905,00	30	14.476.905,00	30	14.476.905,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				1.000.000,00		1.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		725	1.000.000,00	725	1.000.000,00	725	11.000.000,00	725	11.000.000,00	725	11.000.000,00	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				34.625.000,00		34.625.000,00		34.625.000,00		34.625.000,00		34.625.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	20	34.625.000,00	20	34.625.000,00	20	34.625.000,00	20	34.625.000,00	20	34.625.000,00	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan	0	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota	dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00		
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Rehabilitasi Sosial														
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang)		2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				164.269.500,00		164.269.500,00		184.269.500,00		184.269.500,00		184.269.499,00		
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			164.269.500,00		164.269.500,00		184.269.500,00		184.269.500,00		184.269.499,00		
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)													
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		500		500		500		500		500			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Dokumen)												
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	(PPKS) Lainnya (Orang)													
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		500	1.000.000,00	500	1.000.000,00	500	1.000.000,00	500	1.000.000,00	500	1.000.000,00		
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				10.858.000,00		10.858.000,00		10.858.000,00		10.858.000,00		10.858.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20	10.858.000,00	20	10.858.000,00	20	10.858.000,00	20	10.858.000,00	20	10.858.000,00		
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		126.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		10	126.000.000,00	10	126.000.000,00	10	126.000.000,00	10	126.000.000,00	10	126.000.000,00		
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		19.999.999,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		19.999.999,00	
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				0		0		0		0		0	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0		0		0		0		0	
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Orang)												
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				26.411.500,00		26.411.500,00		26.411.500,00		26.411.500,00		26.411.500,00	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	26.411.500,00	1	26.411.500,00	1	26.411.500,00	1	26.411.500,00	1	26.411.500,00	
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				54.288.125,00		54.288.125,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	1	54.288.125,00	1,5	54.288.125,00	2	115.000.000,00	2,5	115.000.000,00	2,5	115.000.000,00		
	Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	75,4	90		100		100		100		100			
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				54.288.125,00		54.288.125,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)		3.974	54.288.125,00	3.974	54.288.125,00	3.974	115.000.000,00	3.974	115.000.000,00	3.974	115.000.000,00		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2.260		2.260		2.260		2.260		2.260		
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		5		5		5		5		5		
	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)												
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)						3.219		3.219		3.219		
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		60.711.875,00		60.711.875,00		60.711.875,00	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)			0,00		0,00	3.219	60.711.875,00	3.219	60.711.875,00	3.219	60.711.875,00	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi		5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2.200	15.000.000,00	2.200	15.000.000,00	2.200	15.000.000,00	2.200	15.000.000,00	2.200	15.000.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				13.722.000,00		13.722.000,00		13.722.000,00		13.722.000,00		13.722.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)		3.974	13.722.000,00	3.974	13.722.000,00	3.974	13.722.000,00	3.974	13.722.000,00	3.974	13.722.000,00		
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				566.125,00		566.125,00		566.125,00		566.125,00		566.125,00		
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2.260	566.125,00	2.260	566.125,00	2.260	566.125,00	2.260	566.125,00	2.260	566.125,00		
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Miskin Kabupaten/Kota														
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang)			0		0		0		0		0		0
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				116.326.300,00		116.326.300,00		202.738.120,00		202.738.120,00		202.738.120,00		202.738.120,00
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	116.326.300,00	100	116.326.300,00	100	202.738.120,00	100	202.738.120,00	100	202.738.120,00	100	202.738.120,00
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	100	100		100		100		100		100		100	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				111.326.300,00		111.326.300,00		152.738.120,00		152.738.120,00		152.738.120,00		152.738.120,00
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			111.326.300,00		111.326.300,00		152.738.120,00		152.738.120,00		152.738.120,00		152.738.120,00
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2		2		20		20		20		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				111.126.300,00		111.126.300,00		132.538.120,00		132.538.120,00		132.538.120,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		1.000	111.126.300,00	1.000	111.126.300,00	1.000	132.538.120,00	1.000	132.538.120,00	1.000	132.538.120,00	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				200.000,00		200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		2	200.000,00	2	200.000,00	20	20.200.000,00	20	20.200.000,00	20	20.200.000,00	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)			5.000.000,00		5.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)						26		26		26		
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		26		26		26		26		26		
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)						50		50		50		
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)						1		1		1		
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Desa/Kelurahan)												
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0,00		0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)			0,00		0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		26	5.000.000,00	26	5.000.000,00	26	10.000.000,00	26	10.000.000,00	26	10.000.000,00	
1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)			0,00		0,00	26	25.000.000,00	26	25.000.000,00	26	25.000.000,00	
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang)			0,00		0,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				9.569.200,00		9.569.200,00		10.000.000,00		10.000.000,00		9.569.200,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik (%)	100	100	9.569.200,00	100	9.569.200,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	9.569.200,00	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				9.569.200,00		9.569.200,00		10.000.000,00		10.000.000,00		9.569.200,00	
Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)		1	9.569.200,00	1	9.569.200,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	9.569.200,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)												
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				9.569.200,00		9.569.200,00		10.000.000,00		10.000.000,00		9.569.200,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)		1	9.569.200,00	1	9.569.200,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	9.569.200,00	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.272.224.200,00		1.272.224.200,00		1.272.224.200,00		1.272.224.200,00		1.272.224.200,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				608.594.200,00		608.594.200,00		608.594.200,00		608.594.200,00		608.594.200,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Proporsi Perempuan Pada Legislatif (%)	15	15	608.594.200,00	15	608.594.200,00	15	608.594.200,00	20	608.594.200,00	20	608.594.200,00	
	Persentase Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	41,28	68,87		69,17		69,47		69,77		70,07		
	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	26,05	36,81		37,11		37,41		37,71		38,01		
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,06	5,47		5,67		5,88		6,08		6,29		
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga				41.176.800,00		41.176.800,00		41.176.800,00		41.176.800,00		41.176.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		26	41.176.800,00	26	41.176.800,00	26	41.176.800,00	26	41.176.800,00	26	41.176.800,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)		35		35		35		35		35			
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				33.644.000,00		33.644.000,00		33.644.000,00		33.644.000,00		33.644.000,00		
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)		26	33.644.000,00	26	33.644.000,00	26	33.644.000,00	26	33.644.000,00	26	33.644.000,00		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				7.532.800,00		7.532.800,00		7.532.800,00		7.532.800,00		7.532.800,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non		35	7.532.800,00	35	7.532.800,00	35	7.532.800,00	35	7.532.800,00	35	7.532.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemerintah) (Lembaga)												
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				567.417.400,00		567.417.400,00		567.417.400,00		567.417.400,00		567.417.400,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)		150	567.417.400,00	150	567.417.400,00	150	567.417.400,00	150	567.417.400,00	150	567.417.400,00	
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)		100		100		100		100		100		
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				308.564.200,00		308.564.200,00		308.564.200,00		308.564.200,00		308.564.200,00	
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi		100	308.564.200,00	100	308.564.200,00	100	308.564.200,00	100	308.564.200,00	100	308.564.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)													
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				258.853.200,00		258.853.200,00		258.853.200,00		258.853.200,00		258.853.200,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)		150	258.853.200,00	150	258.853.200,00	150	258.853.200,00	150	258.853.200,00	150	258.853.200,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				197.700.000,00		197.700.000,00		197.700.000,00		197.700.000,00		197.700.000,00		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	69,38	56,67	197.700.000,00	48,70	197.700.000,00	43,22	197.700.000,00	37,97	197.700.000,00	30,89	197.700.000,00		
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				50.415.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)		5	50.415.000,00	5	50.415.000,00	5	50.415.000,00	5	50.415.000,00	5	50.415.000,00	
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	1	3.900.000,00	
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				46.515.000,00		46.515.000,00		46.515.000,00		46.515.000,00		46.515.000,00	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat		5	46.515.000,00	5	46.515.000,00	5	46.515.000,00	5	46.515.000,00	5	46.515.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kab/Kota	provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)													
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				114.410.000,00		114.410.000,00		114.410.000,00		114.410.000,00		114.410.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20	114.410.000,00	20	114.410.000,00	20	114.410.000,00	20	114.410.000,00	20	114.410.000,00		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20		20		20		20		20			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		12		12		12		12		12		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20		20		20		20		20		
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		8		8		8		8		8		
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				9.090.000,00		9.090.000,00		9.090.000,00		9.090.000,00		9.090.000,00	
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		8	9.090.000,00	8	9.090.000,00	8	9.090.000,00	8	9.090.000,00	8	9.090.000,00	
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				22.600.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00		22.600.000,00	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20	22.600.000,00	20	22.600.000,00	20	22.600.000,00	20	22.600.000,00	20	22.600.000,00	
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		6	15.600.000,00	6	15.600.000,00	6	15.600.000,00	6	15.600.000,00	6	15.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kabupaten/Kota (Orang)												
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.700.000,00		20.700.000,00		20.700.000,00		20.700.000,00		20.700.000,00	
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		12	20.700.000,00	12	20.700.000,00	12	20.700.000,00	12	20.700.000,00	12	20.700.000,00	
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				9.350.000,00		9.350.000,00		9.350.000,00		9.350.000,00		9.350.000,00	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20	9.350.000,00	20	9.350.000,00	20	9.350.000,00	20	9.350.000,00	20	9.350.000,00	
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				27.070.000,00		27.070.000,00		27.070.000,00		27.070.000,00		27.070.000,00	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)		20	27.070.000,00	20	27.070.000,00	20	27.070.000,00	20	27.070.000,00	20	27.070.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00	
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)		30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00		32.875.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)		30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	30	32.875.000,00	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	50	50	80.660.000,00	50	80.660.000,00	50	80.660.000,00	50	80.660.000,00	50	80.660.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00	
Meningkatnya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00		80.660.000,00	
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)		100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	100	80.660.000,00	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	80	92,30	2.030.000,00	96,20	2.030.000,00	96,20	2.030.000,00	100	2.030.000,00	100	2.030.000,00	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data				2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00	2	2.030.000,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				75.250.000,00		75.250.000,00		75.250.000,00		75.250.000,00		75.250.000,00		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	61,45	61,47	75.250.000,00	61,48	75.250.000,00	61,50	75.250.000,00	61,51	75.250.000,00	61,52	75.250.000,00		
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	3	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00		10.500.000,00	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Lembaga)												
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00	
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	60	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00		64.750.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	60	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	40	64.750.000,00	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				307.990.000,00		307.990.000,00		307.990.000,00		307.990.000,00		307.990.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kota (%)	100	100	307.990.000,00	100	307.990.000,00	100	307.990.000,00	100	307.990.000,00	100	307.990.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
lainnya terhadap anak														
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				56.210.000,00		56.210.000,00		56.210.000,00		56.210.000,00		56.210.000,00		
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)		230	56.210.000,00	230	56.210.000,00	230	56.210.000,00	230	56.210.000,00	230	56.210.000,00		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)		1		1		1		1		1			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				3.820.000,00		3.820.000,00		3.820.000,00		3.820.000,00		3.820.000,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)		1	3.820.000,00	1	3.820.000,00	1	3.820.000,00	1	3.820.000,00	1	3.820.000,00		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan				52.390.000,00		52.390.000,00		52.390.000,00		52.390.000,00		52.390.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota														
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)		230	52.390.000,00	230	52.390.000,00	230	52.390.000,00	230	52.390.000,00	230	52.390.000,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				172.880.000,00		172.880.000,00		172.880.000,00		172.880.000,00		172.880.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		2	172.880.000,00	2	172.880.000,00	2	172.880.000,00	2	172.880.000,00	2	172.880.000,00		
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		30		30		30		30		30			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		6		6		6		6		6		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		25		25		25		25		25		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		10		10		10		10		10		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		30		30		30		30		30		
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00		12.100.000,00	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau		30	12.100.000,00	30	12.100.000,00	30	12.100.000,00	30	12.100.000,00	30	12.100.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota	Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				54.440.000,00		54.440.000,00		54.440.000,00		54.440.000,00		54.440.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		25	54.440.000,00	25	54.440.000,00	25	54.440.000,00	25	54.440.000,00	25	54.440.000,00		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		25	22.500.000,00	25	22.500.000,00	25	22.500.000,00	25	22.500.000,00	25	22.500.000,00		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.980.000,00		5.980.000,00		5.980.000,00		5.980.000,00		5.980.000,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		10	5.980.000,00	10	5.980.000,00	10	5.980.000,00	10	5.980.000,00	10	5.980.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		6	16.800.000,00	6	16.800.000,00	6	16.800.000,00	6	16.800.000,00	6	16.800.000,00	
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				33.060.000,00		33.060.000,00		33.060.000,00		33.060.000,00		33.060.000,00	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		30	33.060.000,00	30	33.060.000,00	30	33.060.000,00	30	33.060.000,00	30	33.060.000,00	
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kabupaten/Kota														
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)		1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				78.900.000,00		78.900.000,00		78.900.000,00		78.900.000,00		78.900.000,00		
Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)		1	78.900.000,00	1	78.900.000,00	1	78.900.000,00	1	78.900.000,00	1	78.900.000,00		
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)		3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)		30		30		30		30		30		
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				23.375.000,00		23.375.000,00		23.375.000,00		23.375.000,00		23.375.000,00	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)		1	23.375.000,00	1	23.375.000,00	1	23.375.000,00	1	23.375.000,00	1	23.375.000,00	
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00	
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		3	22.500.000,00	3	22.500.000,00	3	22.500.000,00	3	22.500.000,00	3	22.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kabupaten/kota (Dokumen)												
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				33.025.000,00		33.025.000,00		33.025.000,00		33.025.000,00		33.025.000,00	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)		30	33.025.000,00	30	33.025.000,00	30	33.025.000,00	30	33.025.000,00	30	33.025.000,00	

Berdasarkan tabel diatas maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok telah didukung oleh program dan pagu anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2030. Selain itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
Urusan : Sosial				
1	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	<i>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	SPM
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan stimulan modal	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
3.	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan sosial Korban Bencana	<i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	SPM
			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	
			Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
			Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
		komprehensif	<i>Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<i>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			tingkat daerah kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
8.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
9.	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	

No	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
			Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
10.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Komitmen Pemerintah Daerah Kota Solok dalam peningkatan pembangunan di bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berfokus pada peningkatan kualitas hidup, kesetaraan gender, dan perlindungan penuh bagi kelompok rentan, terutama anak-anak. yang dilaksanakan dengan bentuk kebijakan konkrit secara bertahap, yang tertuang dalam program-program prioritas. Komitmen ini selaras dengan tujuan Pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan kesetaraan gender.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mencapai visi, misi dan sasaran strategisnya. IKU menjadi fondasi bagi pelaksanaan evaluasi kinerja secara objektif, memastikan bahwa setiap program, kebijakan dan kativitas yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan komponen Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 pada tabel 4.4 sebagai berikut ini:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.2.08.0.00.34.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,09	58,09	58,50	59,50	60,50	61,50	62	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,70	72,65	74,60	76,55	78,50	80,45	82,40	
3.	Persentase PSKS yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,147	0,147	0,145	0,143	0,142	0,14	0,138	
5.	Persentase PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang Mandiri	%	0	3,57	7,41	11,54	16	20,83	26,09	
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,64	96,95	97,04	97,13	97,22	97,31	97,4	
7.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	83,81	83,81	83,83	83,84	83,86	83,88	83,89	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83	85	85,50	87,5	88	88,5	
9.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,59	65,59	65,69	65,79	65,89	65,99	70	
10.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5	4,12	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18	

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. IKK adalah alat ukur yang sangat penting untuk mengukur aspek-aspek kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. IKK berfokus pada pencapaian target-target strategis yang dianggap krusial guna mendukung keberhasilan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, dan efektivitas administratif. Dengan demikian, IKK tidak hanya mencerminkan hasil akhir, tetapi juga proses kunci yang mendasari kinerja operasional secara menyeluruh. IKK menekankan pada aspek-aspek kritis yang jika tidak tercapai dapat menghambat keberhasilan keseluruhan program dan kebijakan

Setelah pemaparan Komponen Indikator Kinerja Utama Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2030 diatas, maka berikut ini akan diuraikan target indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030 sebagai berikut ini:

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	Persentase	66	66	66	70	80	90	100	
2.	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	70	70	80	90	100	100	100	
3.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	50	50	60	70	80	90	100	
5.	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan/Atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dan/Atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota Pada Masa Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Sesuai Standar		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti		%	66	66	70	74	78	82	85	
8.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		Persentase	0	5,64	4,90	5,15	5,43	5,74	6,09	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
9.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		Persentase	75,4	80	90	100	100	100	100	
10.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	51	51	55	60	65	70	75	
11.	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar		%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Disediakan Sesuai Standar		%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Sarana Prasarana Yang Disediakan Sesuai Standar Untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti	positif	%	70	70	70	80	90	100	100	
14.	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Dilakukan Selama Satu Tahun		Kali	12	12	12	12	12	12	12	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
15.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks	0,147	0,147	0,145	0,143	0,142	0,14	0,138	
16.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	96,64	96,95	97,04	97,13	97,22	97,31	97,4	
17.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase ARG Daerah	positif	%	5,06	5,26	5,47	5,67	5,88	6,08	6,29	
19.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Dalam kurun waktu 2025-2030, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok menargetkan meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Reviu Tengah Periode Renstra, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.


WALIKOTA SOLOK
RAMADHANI KIRANA PUTRA

